

# **KARAKTERISTIK LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH TEPIAN SUNGAI KECAMATAN KOLAKA, SULAWESI TENGGARA**

**Nurmaida Amri**  
**Fak. Teknik Jur. Arsitektur Universitas Hasanuddin**  
**email: Nurmaida@gmail.com**

## **Abstrak**

Tumbuhnya kawasan perumahan & permukiman yang kurang layak huni di kawasan tepian sungai, berdampak pada kecenderungan berkembangnya lingkungan kumuh yang tidak sesuai dengan standar permukiman yang sehat. Kondisi sosial ekonomi penduduk yang umumnya berpenghasilan sangat rendah, belum tersedianya sarana dan prasarana umum, serta status tanah yang tidak resmi, menyebabkan semakin kumuhnya permukiman. Jika kondisi tersebut tidak dikendalikan pertumbuhannya, maka kualitas lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat akan terus menurun.

Penelitian ini bertujuan: (1) mengidentifikasi karakteristik permukiman kumuh di tepian sungai, dan; (2) mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kekumuhan. Penelitian ini menggunakan metode survey, dengan penentuan lingkungan sampel dilakukan secara purposive sampling. Lokasi penelitian di Kecamatan Kolaka, khususnya di Kelurahan Lamokato. Ukuran sampel sebanyak 30 rumah, yang dipilih secara proporsional dari dua wilayah lingkungan, yaitu pesisir sungai, dan atas sungai.

Hasil penelitian menunjukkan secara umum karakteristik perumahan dan permukiman tepian air di Kelurahan Lamokato: (1) kondisi sarana, prasarana & utilitas buruk; (2) tingkat kepadatan bangunan tinggi; (3) kelayakan bangunan rendah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor ekonomi penduduk yang umumnya adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga motivasi untuk memiliki lingkungan dan rumah yang layak sangat rendah. Dengan demikian identifikasi terhadap karakteristik kawasan permukiman diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan rencana tindak dalam proses penyusunan perencanaan dan perumusan pembangunan daerah secara terpadu (komprehensif).

**Kata kunci:** permukiman kumuh tepian sungai, sarana dan prasarana, lingkungan, penduduk

### **1. Pendahuluan**

Perumahan dan permukiman dalam pengertian luas bukan hanya berarti tempat tinggal, melainkan suatu kesatuan kompleks yang melibatkan berbagai unsur kebudayaan. Unsur-unsur itu tidak hanya menonjolkan kegiatan biologis, tetapi juga berbagai kegiatan sosial, politik, agama dan sebagainya. Suatu proses perubahan perumahan dan permukiman tidak bisa dilihat hanya dari sisi kebendaan atau sebagai sarana hidup, tetapi juga sebagai proses bermukim, tempat kehadiran manusia dalam menciptakan ruang hidup di lingkungan masyarakat dan alam sekitarnya. Salah satu permasalahan menyangkut perumahan adalah banyaknya pertumbuhan permukiman kumuh di kawasan pinggiran kota dan pesisir sungai/laut yang merupakan kantong air perkotaan. Keberadaan perumahan bagi masyarakat merupakan salah satu dari kebutuhan masyarakat dalam kehidupannya. Menurut Alkema dan Bezemer (1927), terdapat 3 tipe perkampungan rakyat berdasarkan karakter fisiknya, yaitu perkampungan air, perkampungan benteng dan perkampungan desa.

Kelurahan Lamokato merupakan perkampungan air yang telah lama dihuni oleh penduduk setempat dan berkembang seiring pertumbuhan kota. Dari hasil identifikasi kondisi perumahan dan permukiman di Kecamatan Kolaka tahun 2009, permukiman di sepanjang tepian sungai Balandete Kelurahan Lamokato

merupakan permukiman kumuh yang membutuhkan penanganan khusus dalam hal sarana & prasarana permukiman, hal ini terkait pula kondisi sosial & ekonomi penduduk yang umumnya adalah penduduk miskin. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat dalam perbaikan lingkungan dan pembangunan tanggul sungai Kolaka sepanjang 200 m, pemasangan paving blok, jalan lingkungan, pembangunan taman kota, merupakan upaya Pemda setempat untuk meningkatkan kualitas fisik & nonfisik lingkungan perumahan & permukiman di Kelurahan Lamokato. Keberhasilan kegiatan peningkatan kualitas permukiman sangat tergantung pada kemampuan berbagai lembaga dan masyarakat dalam melakukan proses pelaksanaan pembangunan. Khususnya kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah serta perbaikan kualitas lingkungan perumahan & permukiman dengan menghindari dampak negatif dari eksploitasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan.

## **2. Tinjauan Pustaka**

Masalah permukiman adalah masalah multisektoral, menyangkut berbagai aspek dan berbagai sektor, antara lain aspek teknik, perencanaan, tata ruang, tata lingkungan, kehidupan sosial ekonomi, keagamaan, budaya, dll. Aspek-aspek tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

### **1. Paradigma Ekonomi**

Hal ini berkaitan dengan alokasi dan sumberdaya dan pemahaman bagaimana dimensi ekonomi berperan dalam pengadaan permukiman, yang mencakup:

- a. Kemampuan bayar; mencakup dana dan upaya, yaitu bagaimana membangkitkan kemampuan membayar kalangan berpendapatan rendah. Perlu dipikirkan bagaimana sistem pembayaran dan pinjaman.
- b. Biaya pengadaan; biaya struktur bangunan, prasarana lingkungan, kelembagaan dan biaya ekonomi. Semakin kecil biaya pengadaan, semakin banyak penduduk yang terlayani.
- c. Cara pembayaran; berkaitan dengan kesesuaian antara kemampuan membayar dengan biaya pembangunan.
- d. Kepemilikan; adanya jaminan kepemilikan, akan menjamin penduduk untuk tinggal.
- e. Fluktuasi ekonomi negara; harga rumah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Negara.

### **2. Paradigma Sosial**

- a. Otonomi; perlunya keterlibatan penghuni dalam memutuskan perbaikan lingkungannya.
- b. Minat bersama; upaya menggalang masyarakat agar merasakan kebersamaan, untuk menciptakan lingkungan permukiman yang baik.
- c. Berkekuatan hukum; adanya rasa keamanan dalam kepemilikan dan aset.
- d. Efisiensi; dalam organisasi penyediaan, apabila dilakukan secara kekeluargaan jumlah rumah yang ditata kemungkinan jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan cara baku.
- e. Mudah diadaptasikan; adaptasi secara responsif terhadap perubahan suatu lingkungan.

### **3. Paradigma Fisik**

- a. Lahan; berkaitan dengan kepemilikan lahan dan kemudahan lokasi terhadap faktor ekonomi.
- b. Lingkungan bersama; berkaitan dengan ketersediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dalam lingkungan bersama (*neighbourliners*).

- c. Rumah dan ruang yang sesuai dengan kebutuhan penghuni, baik budaya, ekonomi maupun psikis.
- d. Teknologi yang digunakan; penggunaan teknologi tepat guna yang fleksibel, mencakup kemungkinan adanya partisipasi penghuni maupun masyarakat.

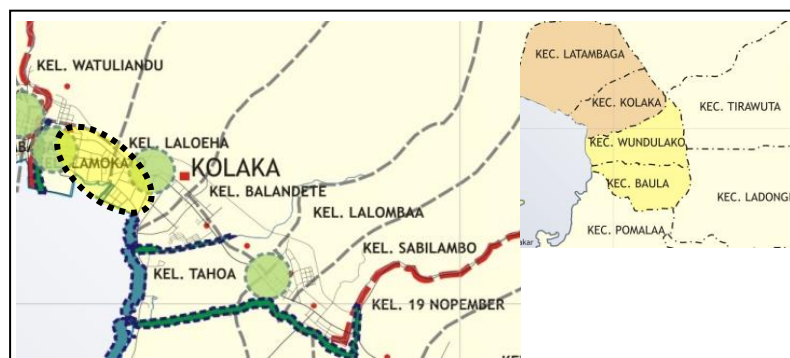
### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, eksploratif dan interpretatif yang mempelajari secara teoritis dengan melakukan observasi dan eksplorasi data primer dengan mengamati kondisi lingkungan perumahan & permukiman kumuh di kawasan tepian sungai, Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Sulawesi Tenggara. Populasi penelitian adalah seluruh rumah & kepala rumah tangga yang tinggal dalam kawasan permukiman tepian sungai. Besar sampel ditentukan 10% dari jumlah rumah tangga yang terdapat di kawasan permukiman. Sampel responden ditentukan secara proporsional sebanyak 30 sampel. Teknik analisis data meliputi:

- a. Studi literatur & pemahaman tentang lokasi tepian sungai
- b. Pengumpulan data dan analisis kondisi lapangan, topografi dan batasan fisik kawasan dan studi tipologi kawasan, dengan penyusunan format isian/ *check list* tentang kriteria permukiman.
- c. Identifikasi kawasan tepian sungai dan penyusunan daftar prioritas yang mengacu pada data potensi desa/kelurahan atau data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

### 4. Gambaran Umum Lokasi

Kecamatan Kolaka memiliki luas wilayah 218.38 km<sup>2</sup> meliputi: Kelurahan Watuliandu, Kelurahan Lamokato, Kelurahan Tahoa, Kelurahan Laloeha, Kelurahan Balandete, Kelurahan Lalomba, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka. Secara administratif Kecamatan Kolaka berbatasan dengan Kecamatan Latambaga di sebelah utara, Kecamatan Mowewe di sebelah timur, Kecamatan Wundulako di sebelah selatan dan Teluk Bone di sebelah barat, dan sebagai lokasi penelitian Kelurahan Lamokato berbatasan dengan 4 Kelurahan, yaitu Kelurahan Watuliandu, Laloeha, Balandete dan Tahoa. Luas lahan kawasan permukiman tepian sungai pada Kelurahan Lamokato mencapai 65,2 km<sup>2</sup>, terletak di tepi sungai Balandete dengan luas lahan ±30% berada di sekitar kawasan perdagangan; pasar dan terminal.



**Gambar 1. Letak Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka secara administratif**

## **5. Tinjauan Lokasi Perumahan dan Permukiman**

Selanjutnya pembahasan mencakup identifikasi lokasi perumahan & permukiman terhadap kriteria: kesesuaian lokasi terhadap RTRW Kecamatan Kolaka, legalitas tanah, status penguasaan bangunan, frekuensi bencana kebakaran, banjir dan tanah longsor.

### **a. Lokasi Perumahan dan Permukiman Tepian Sungai ditinjau terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Kolaka**

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah, Kecamatan Kolaka diperuntukkan bagi sektor Perekonomian dan Jasa Perkantoran, Fasilitas Umum, Pendidikan, Pemukiman, Pertanian dan Perkebunan. Sebagai bagian dari wilayah Kecamatan Kolaka; Kelurahan Lamokato merupakan area dengan fungsi perumahan, sedangkan di sepanjang area sungai dan pantai merupakan fungsi perdagangan dan empang. Kelurahan Lamokato terbagi dalam 4 RW, dengan jumlah keseluruhan penduduk 6.217 jiwa, terdiri dari 3.793 penduduk dewasa, dan 1.367 KK (tahun 2011). RW 3 Kelurahan Lamokato merupakan perkampungan air yang padat dan dihuni oleh 1.982 jiwa, 313 KK.

### **b. Legalitas Tanah**

Status kepemilikan tanah pada kawasan permukiman dan perumahan di Kelurahan Lamokato pada tahun 2009 umumnya merupakan tanah bersertifikat (63,6%), selebihnya adalah tanah sewa (18,2%) dan tanah pinjam dari keluarga terdekat (18,2%). Sebagian besar penduduk telah menempati lahan bersertifikat, dengan status kepemilikan bangunan merupakan rumah milik pribadi, dan kurang dari 30% rumah dibangun di atas tanah tidak bersertifikat dan tidak sesuai peruntukannya.

### **c. Status Penguasaan Bangunan**

Dari jumlah seluruh KK yang tinggal di kawasan perumahan dan permukiman tepian sungai Kelurahan Lamokato (tahun 2009), 72,7% di antaranya menghuni rumah yang dibangun sendiri dan 27,3% KK masih tinggal di rumah kontrak/sewa. Sebagian besar telah menempati tanah milik bersertifikat, sehingga status kepemilikan rumah pun dominan merupakan rumah milik pribadi. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi tahun 2011, kurang lebih 77,7% telah menempati rumah milik pribadi.

### **a. Frekuensi Bencana**

Umumnya letak rumah pada kawasan perumahan dan permukiman Kelurahan Lamokato RW 3 berada di bantaran sungai/ sempadan sungai dengan jarak rata-rata kurang dari 5 m dari sisi sungai. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai dengan kebiasaan membuang sampah, air kotor dan jamban di sungai, menyebabkan rusaknya komunitas sungai. Sedangkan bencana kebakaran tidak terjadi dalam satu tahun terakhir, kecuali pada beberapa kelompok rumah dengan tingkat kepadatan tinggi yang cenderung rawan terjadi kebakaran. Dengan adanya perbaikan tanggul dan jalan lingkungan pada saat ini kondisi bantaran sungai tidak lagi rawan bencana banjir dan longsor. Disamping itu perlunya penambahan sarana TPS yang dikelola dengan baik dan penataan kembali kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan rendah, untuk menghindari terjadinya bencana kebakaran massal.



**Gambar 2. Kondisi tanggul pada bibir sungai sebelum dilakukan perbaikan**

## **6. Tinjauan terhadap Kependudukan**

Indikator terhadap perumahan dan permukiman layak huni dari aspek kependudukan mencakup 10 kriteria, yaitu: kepadatan penduduk, jumlah rata-rata anggota rumah tangga, jumlah kepala keluarga per rumah, tingkat pertumbuhan penduduk, angka kematian, status gizi balita, angka kesakitan malaria, diare, demam berdarah dan ispa.

### **a. Kondisi Sosial Penduduk**

Umumnya penduduk yang menempati kawasan tepian sungai berasal dari Kolaka (45,4%) dan Bugis/Makassar (45,4%) dan selebihnya berasal dari luar Sulawesi. Umumnya masyarakat yang tinggal di RW 3 Kelurahan Lamokato bekerja di sekitar kawasan ini sebagai pedagang ataupun nelayan. Umumnya penduduk pendatang ini telah bermukim di lokasi  $\pm$  10 tahun, sedangkan penduduk asli yang ada telah menempati lokasi selama lebih dari 40 tahun. Menurut Rapoport (1969) pola lingkungan permukiman memiliki bentuk berbeda sesuai dengan kekuatan non fisik yang tumbuh pada masyarakat berupa sistem sosial budaya, pemerintahan, tingkat pendidikan, serta teknologi terapan yang akan membawa perubahan pada ungkapan fisik lingkungannya.

### **b. Tingkat Kepadatan Penduduk**

Masalah tingkat kepadatan penduduk di Kelurahan Lamokato masih menjadi kendala utama. Kelurahan Lamokato sebagai fungsi perdagangan & permukiman, serta letak permukiman yang dekat dengan lokasi kerja dan keluarga menjadi daya tarik utama bagi warga pendatang yang berasal dari luar Kabupaten Kolaka untuk tinggal dan menetap di kawasan ini. Tingkat kepadatan penduduk tinggi, hingga tahun 2011 mencapai 250,3 jiwa/ha.

### **c. Jumlah Anggota Rumah Tangga dan KK**

Rumah umumnya dihuni oleh 4 – 6 orang (63,6%) dan lebih dari 6 orang (27,3%) yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anaknya. Jumlah Rumah Tangga yang terdapat pada lokasi ini tercatat sebanyak 313 KK, umumnya tiap rumah di huni oleh satu keluarga dengan jumlah anak rata-rata 2 – 4 orang, sehingga jumlah anggota keluarga tidak lebih dari 10 orang. Sedangkan jumlah Kepala keluarga dalam satu rumah umumnya hanya terdapat 1 keluarga dalam satu rumah. Adapun warga pendatang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan penduduk setempat, umumnya membangun sendiri rumah mereka di sekitar perumahan yang ada. Hal ini menyebabkan ketidakteraturan lingkungan, rumah yang tidak tertata, berupa lorong tikus, tanpa jalan, dan tanpa garis sempadan bangunan.

### **d. Tingkat Pertambahan Penduduk**

Berdasarkan data jumlah penduduk pada RW 3 tahun 2009 (1.892 jiwa, 266 KK) dan tahun 2011 (1.982 jiwa, 313 KK) diketahui bahwa kecenderungan pertumbuhan penduduk bertambah rata-rata 2,5% per tahun. Hal ini nampak dari semakin padatnya permukiman di sekitar tepian sungai dan area sungai. Kecenderungan ini menyebabkan semakin tidak tertatanya lingkungan

permukiman dan perumahan di Kelurahan Lamokato, sehingga diperlukan penataan permukiman dan ketersediaan sarana dan prasarana permukiman yang layak. Antisipasi Pemda setempat dengan membangun Rusunawa merupakan upaya untuk memberikan permukiman yang layak bagi masyarakat di Kelurahan Lamokato.

#### e. Status Gizi Balita

Keterbatasan ekonomi, kondisi lingkungan dan bangunan yang tidak layak, menyebabkan rendahnya status gizi balita pada lokasi. Berdasarkan penilaian status gizi balita, terdapat 10 – 30% balita berada di bawah garis merah dengan kondisi sosial ekonomi rendah. Kondisi tersebut hingga tahun 2011 belum mengalami perubahan signifikan, masalah ekonomi masih menjadi penyebab rendahnya status gizi balita.

#### f. Angka Kesakitan dan Angka Kematian

Penyakit yang banyak diderita oleh penduduk di RW 3 Kelurahan Lamokato adalah diare yang sebagian besar diderita oleh anak-anak. Salah satu penyebab dari penyakit tersebut adalah kondisi lingkungan; kondisi sarana dan prasarana lingkungan yang tidak layak, antara lain pelayanan air bersih, sanitasi lingkungan, persampahan dan saluran air. Upaya perbaikan sarana & prasana lingkungan yang telah dilaksanakan belum efektif akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan, serta sarana & prasarana lingkungan menjadi kendala utama dalam perbaikan lingkungan.

### 7. Tinjauan terhadap Kondisi Bangunan

Penilaian terhadap perumahan dan permukiman dari aspek kondisi bangunan mencakup 4 kriteria, yaitu tingkat kualitas dan kelayakan bangunan, kepadatan bangunan dan tingkat penggunaan luas lantai.

#### a. Tingkat Kualitas dan Kelayakan Bangunan

Sebagian besar rumah penduduk berbentuk rumah biasa dan rumah panggung. Umumnya merupakan bangunan sederhana, semi permanen, dan tidak layak huni. Berdasarkan pengamatan di lokasi terdapat  $\pm 60\%$  rumah tidak layak huni, terutama rumah-rumah yang berada di tepi sungai, dengan kondisi material konstruksi yang mudah rusak dan berkesan darurat.



Gambar 3. Kondisi rumah warga yang sangat sederhana dan berkesan darurat

#### b. Tingkat Kepadatan Bangunan

Pengembangan pembangunan rumah di RW 3 Kelurahan Lamokato cenderung tidak terencana, berkembang sesuai kebutuhan pemilik, tanpa memperhatikan jarak antar bangunan, jarak antar rumah tetangga dan pola jalan. Pada lingkungan terpadat rata-rata tingkat kepadatan bangunan adalah 3 unit rumah per 120 m<sup>2</sup> atau 250 unit rumah/ha, sehingga termasuk dalam kategori sangat kumuh, dan beberapa unit rumah memiliki luas pekarangan kurang dari 60 m<sup>2</sup> (kategori kumuh berat). Kondisi ini

belum banyak mengalami perubahan, perbaikan lingkungan masih terbatas pada perkerasan jalan lingkungan dengan pavingblock dan saluran drainase, sehingga belum mencakup penataan permukiman secara makro.

**c. Tingkat Penggunaan Luas Lantai**

Tingkat penggunaan luas lantai rumah dominan kurang dari 60 m<sup>2</sup>, dengan ukuran 5x8 m, 5x6, 4x5 m dan dihuni ± 4 – 6 orang/rumah. Dengan demikian rata-rata penghuni menempati 5 – 6 m<sup>2</sup> per orang. Berdasarkan standar perencanaan rumah sehat (Komaruddin, 1996), luas lantai rumah per orang disyaratkan 7 – 10 m<sup>2</sup> per orang, sehingga kondisi di lokasi termasuk dalam kumuh berat (>4,5 – 6,5 m<sup>2</sup>/orang). Kondisi tersebut menunjukkan luas lantai rumah penduduk tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan sebagian penduduk tinggal dalam rumah yang tidak layak huni. Turner (1972) mengemukakan bahwa perbedaan tingkat penghasilan berpengaruh terhadap prioritas pemenuhan kebutuhan pada perumahan. Masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, lebih mementingkan kebutuhan akan kesempatan dan keamanan daripada kebutuhan identitas diri, sebaliknya pada masyarakat berpenghasilan menengah ke atas, kebutuhan identitas diri justru lebih dipentingkan. Dengan demikian pengembangan rumah merupakan suatu proses yang lahir dari prioritas kebutuhan penghuni akibat aspek sosial budaya yang berlaku dalam tata kehidupan penghuni rumah itu sendiri.

**8. Tinjauan terhadap Kondisi Prasarana dan Sarana Lingkungan**

Penilaian terhadap perumahan dan permukiman dari aspek prasarana dan sarana lingkungan mencakup 6 kriteria, yaitu: tingkat pelayanan air bersih, sanitasi lingkungan, persampahan, air hujan, jalan dan ruang terbuka.

**a. Tingkat Pelayanan Air Bersih**

Di RW 3 Kelurahan Lamokato sebagian besar penduduk telah memperoleh air bersih dari saluran PAM (72,7%) terutama yang bermukim di atas tanah, namun bagi penduduk yang bermukim di atas sungai umumnya harus menyambung dari tetangga (18,2%) atau membeli air (9,1%). Pada lokasi tertentu masih dapat diperoleh air dari sumur galian, namun kualitas air kurang baik akibat resapan air dari sungai, sehingga hanya dapat dipergunakan untuk fungsi MCK. Berdasarkan kondisi ini kurang lebih terdapat 27,3% dari penduduk yang tidak terlayani air bersih, sehingga dapat dikategorikan sebagai kumuh ringan.



**Gambar 4. Penduduk memanfaatkan air sungai untuk mencuci pakaian sebagai pengganti air bersih dari PAM**

**b. Kondisi Sanitasi Lingkungan**

Dari kondisi sanitasi lingkungan sebagian besar penduduk belum menyadari pentingnya kesehatan lingkungan. Hal ini nampak pada kebiasaan penduduk yang membuang air kotor rumah tangga ke sungai (90%) dan

hanya 9,1% rumah yang memiliki saluran ke riol kota. Sedangkan jika ditinjau dari cara jamban penduduk, 72,7% penduduk jamban di sungai dan hanya 27,3% yang telah memiliki wc/km di rumah. Dengan demikian berdasarkan kondisi tersebut terdapat lebih dari 70% KK yang tidak menggunakan fasilitas jamban keluarga atau jamban umum, sehingga dikategorikan sebagai sangat kumuh.

**c. Kondisi Persampahan**

Umumnya penduduk di RW 3 Kelurahan Lamokato membuang sampah di sungai (90,9%) dan selebihnya membakar sampah (9,1%) di pekarangan atau di tempat-tempat terbuka. Tidak adanya armada angkutan sampah dan tempat pembuangan sampah sementara yang memadai menyebabkan penduduk lebih memilih cara yang mudah dilakukan dan tempat yang mudah dijangkau. Dari cara membuang sampah penduduk, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai sangat kumuh, karena lebih dari 70% penduduk membuang sampah di tempat yang bukan peruntukannya, yaitu di sungai dan tempat terbuka.

**d. Kondisi Saluran Air Hujan**

Umumnya kualitas drainase lingkungan di Kelurahan Lamokato merupakan saluran yang permanen, namun kondisinya rusak dan tersumbat sampah (90%), sehingga saluran air hujan tidak dapat berfungsi dengan baik. Pada musim hujan kondisi ini mempercepat naiknya permukaan air yang dapat menyebabkan banjir. Hanya 10% kondisi saluran air hujan yang tidak permanen (berupa galian), namun kurang efektif mengalirkan air karena kemiringan drainase dipengaruhi oleh endapan tanah. Ditinjau dari kondisi saluran air hujan, lokasi ini dikategorikan sebagai sangat kumuh, karena terdapat lebih dari 70% panjang saluran drainase yang tidak lancar atau tergenang.

**e. Kondisi Jalan**

Terdapat 90% jalan lingkungan dan jalan setapak yang memiliki kondisi yang baik dan hanya 10% lahan yang belum terlayani jalan, dengan pola letak jalan dan perumahan yang belum tertata dengan baik. Dengan demikian kondisi ini dikategorikan sebagai tidak kumuh, karena hanya terdapat 10% lahan yang belum terlayani jalan.

**f. Kondisi Ruang Terbuka**

Tapak ruang terbuka di Kelurahan Lamokato, umumnya merupakan lahan tidak terurus yang ditumbuhi tanaman liar, yang juga dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Tingginya kepadatan bangunan di permukiman ini, sehingga penduduk tidak dapat memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk menanam tanaman. Di kawasan tepian sungai hanya nampak tanah kosong yang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah dan menambatkan perahu. Dari kondisi ruang terbuka kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai kumuh sedang, karena hanya terdapat 5 – 7,5 % luas ruang terbuka.

## **9. Tinjauan terhadap Aspek Sosial Ekonomi Penduduk**

Penilaian terhadap perumahan dan permukiman dari aspek sosial ekonomi penduduk mencakup 4 kriteria, yaitu: tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan & tingkat keamanan.

**a. Tingkat Kemiskinan**

Pada tahun 2009 di RW3 Kelurahan Lamokato dari 266 KK terdapat 172 KK penduduk miskin tingkat pra sejahtera dan sejahtera 1, dengan mata



pencaharian sebagai tukang dan pedagang (masing-masing 27,3%), 18,2% berwiraswasta dan selebihnya sebagai PNS, petani dan supir masing-masing sebesar 9,1%. Dinilai dari tingkat kemiskinan lokasi ini dapat dikategorikan sebagai sangat kumuh dengan 64,66% penduduk miskin. Pada tahun 2011 jumlah tersebut menurun, sebanyak 435 jiwa (145 KK) dari 1.982 jiwa (313 KK), atau 43% adalah penduduk miskin dengan penghasilan rata-rata di bawah 1.200.000 rupiah/bulan. Diharapkan upaya mengentaskan kemiskinan dan pemberian bantuan usaha kecil menengah bagi MBR dapat meningkatkan ekonomi penduduk.

**b. Tingkat Pendidikan**

Umumnya tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Lamokato adalah SD (38,7%), SMP (29,3%), SMA (17,7%) dan Perguruan Tinggi (4,8%). Demikian pula dengan tingkat pendidikan kepala keluarga, umumnya hanya setingkat SD (45,4%). Rendahnya tingkat pendapatan, menyebabkan faktor pendidikan tidak menjadi prioritas utama dalam keluarga. Dengan demikian penilaian dari aspek pendidikan terhadap masyarakat di Kelurahan Lamokato terdapat lebih dari 35% penduduk tidak menamatkan pendidikan dasar 9 tahun.

**c. Tingkat Keamanan**

Umumnya kondisi lingkungan relatif aman dari pencurian dan tindak kejahatan lainnya. Penduduk tidak mengalami gangguan keamanan dalam 6 bulan terakhir. Demikian pula dengan konflik antar warga cenderung tidak terjadi, karena adanya hubungan kekerabatan yang erat antar warga atau berasal dari daerah yang sama. Hal ini juga disebabkan oleh persamaan latar belakang sosial budaya dan ekonomi antar penduduk, sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial di masyarakat.

## **10. Kesimpulan & Saran**

**a. Kesimpulan**

Karakteristik permukiman kumuh di Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka: (1) sarana & prasarana air bersih belum terdistribusi merata, pembuangan air kotor dan pembuangan sampah yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan; (2) kualitas lingkungan yang rendah (3) kualitas bangunan yang rendah dan tidak layak huni (4) tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi (5) tingkat kemiskinan yang tinggi.

Dari aspek sarana dan prasarana dapat disimpulkan sebagian besar kondisi yang ada termasuk kategori kumuh, yaitu: sanitasi lingkungan, persampahan dan saluran air hujan. Kebiasaan penduduk membuang sampah, air kotor dan jamban di sungai, menjadikan sungai tercemar. Akibat kurangnya kesadaran penduduk terhadap kesehatan lingkungan, sehingga berimplikasi pada kualitas lingkungan yang rawan bencana banjir dan kualitas hidup penduduk yang rentan terhadap wabah penyakit. Salah satu penyebab tingginya tingkat kepadatan perumahan di Kelurahan Lamokato adalah banyaknya penduduk pendatang yang datang dan bermukim karena alasan letak lokasi kerja dan keberadaan keluarga yang sudah tinggal di lokasi. Hal ini menyebabkan rumah tumbuh padat dan tidak teratur dan kondisi sarana-prasarana yang buruk. Kondisi sosial ekonomi penduduk yang umumnya berpenghasilan sangat rendah, menyebabkan rendahnya motivasi penduduk untuk memiliki rumah yang layak & sehat. Kemudian implikasi dari tingginya tingkat kepadatan bangunan di lokasi menyebabkan kurangnya ruang terbuka.

**b. Saran**

Berdasarkan identifikasi karakteristik perumahan & permukiman pada Kelurahan Lamokato, maka urutan prioritas penanganan dapat disusun berdasarkan urgensi kriteria, yaitu:

- a. Prioritas I : Kondisi prasarana dan sarana lingkungan
- b. Prioritas II : Kondisi rumah/bangunan yang tidak layak huni
- c. Prioritas III : Kepadatan rumah dan bangunan
- d. Prioritas IV : Ketidakteraturan tata letak rumah/bangunan
- e. Prioritas V: Jumlah penduduk miskin
- f. Prioritas VI : Kegiatan usaha ekonomi penduduk di sektor informal
- g. Prioritas VII : Tingkat kepadatan penduduk
- h. Prioritas VIII: Tingkat kerawanan kesehatan dan lingkungan

### Referensi

- Budiardjo, Eko. 1998. *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*, IKAPI, Jakarta.
- BPS Kabupaten Kolaka. *Kabupaten Kolaka dalam Angka, Kolaka Regency in Figures 2011/2012*.
- Catanese, A.J. 1979. *Introduction to Urban Planning*. Mc. Graw Hill, Inc, London.
- Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman. 2001. *Petunjuk Pelaksanaan Perbaikan Lingkungan Permukiman Nelayan PLPL-KIP Nelayan (dengan konsepsi Tridaya)*. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman. 2003. *Laporan Proyek Peningkatan Kualitas Lingkungan Sulawesi Tenggara, Kumuh Sultra*. Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Lingkungan Provinsi Sulawesi Tenggara. Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah.
- Komaruddin. 1996. *Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman*, Yayasan REI, Jakarta.
- Silas, Johan. 1983. *Permukiman Kumuh*, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.
- SKPD Dinas Permukiman & Prasarana Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. 2009. *Laporan Akhir: Identifikasi Kawasan Perumahan & Permukiman Kumuh Nelayan, Tepian Sungai, dan Tradisional di Kabupaten Kolaka & Kolaka Utara*.
- Turner, T.C. 1976. *Housing by People*. Marion Boyars, London.
- Wunas, S. 2002. *Pendekatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Sulawesi Tenggara*. Makalah Lokakarya Daerah, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Yudhohusodo, S. et all. 1991. *Rumah untuk Seluruh Rakyat*. Yayasan Padamu Negeri, Jakarta.